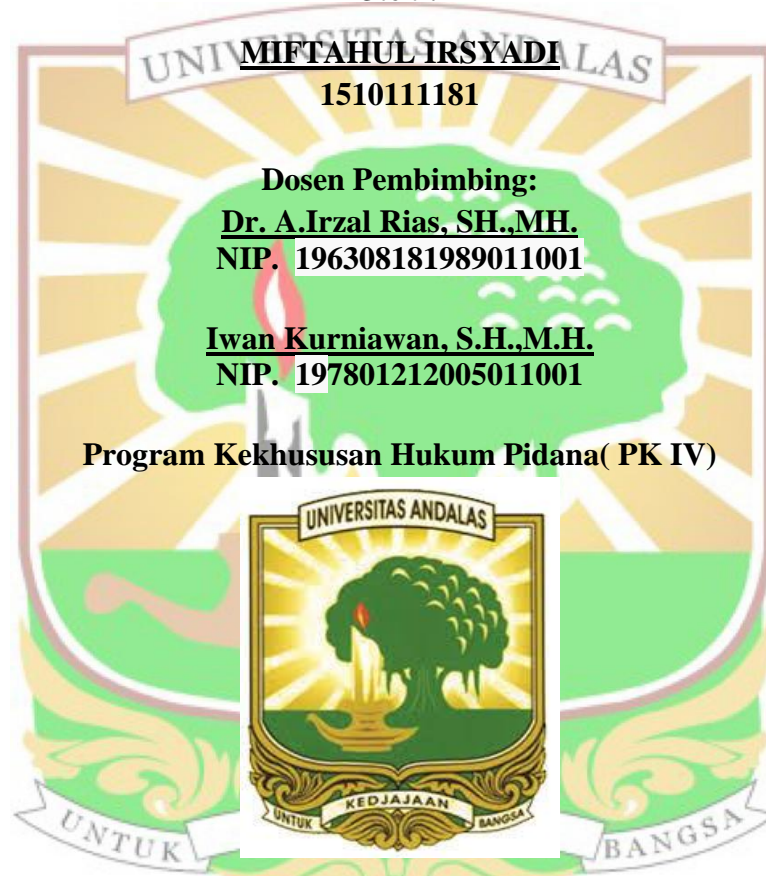


SKRIPSI
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA BIDANG INTELIJEN DI
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



MIFTAHUL IRSYADI

1510111181

Dosen Pembimbing:

Dr. A.Irzal Rias, SH.,MH.

NIP. 196308181989011001

Iwan Kurniawan, S.H.,M.H.

NIP. 197801212005011001

Program Kekhususan Hukum Pidana(PK IV)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

No. Reg. 92/Pk IV/IV/2019

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: MIFTAHUL IRSYADI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Pariaman/3 November 1996 b) Nama Orang Tua: Nazaruddin Jon c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.Bp. : 1510111181	f) Tanggal Lulus : 22 Oktober 2019 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,52 i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan j) Alamat : Perumahan Lembah Nan Indah, Kota Solok	

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA BIDANG INTELIJEN DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

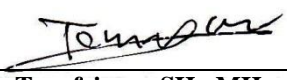

Miftahul Irsyadi. 1510111181. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 70 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ? 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi bertugas: pertama, melakukan Intelijen penyelidikan. Kedua, pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yaitu Faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan Intelijen, Saksi atau informan tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Upaya yang dilakukan Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu Jaksa pada seksi pidana khusus diperbantukan untuk penyelidikan pada seksi Intelijen Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyampaikan permintaan penambahan anggaran kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi atau informan.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
		
Nama terang	Tenofrimer, SH., MH.	Riki Afrizal, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	TandaTangan:	
No. Alumni Universitas	Nama:	TandaTangan:	

